

Mengisyaratkan Sentimen: Selamat Datang, KPK Jokowi! (Sebuah Pendekatan Appraisal pada Teks Berita)

Asrofin Nur Kholifah

English Department, Faculty of Humanities,
Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Article Info

Article history:

Submitted Feb 06, 2020

Revised Dec 10, 2020

Accepted Feb 2, 2021

Published April 01, 2021

Keywords:

Appraisal system

News discourse

Attitude

Sentiment

ABSTRACT

This research examined the journalist sentiment in presenting news on the inauguration of KPK Supervisory Board. Through the Appraisal system, attitude, engagement and graduation were revealed to signify the journalist stance. A descriptive qualitative research was conducted by identifying social phenomenon which were then descriptively presented and analyzed. The data were taken from the online news portal of *Tempo*. The data were the news text entitled *Selamat datang KPK Jokowi* which highlighted the inauguration of KPK Supervisory Board. The result showed that the media represented by the journalist took a negative sentiment toward the issue proved by the dominance of negative judgment and appreciation along with the dominance of intensifiers and attitudinal lexis to support the motifs. Through those linguistic exploitation, the journalist led public perspective and opinion that the capacity, integrity and neutrality of Jokowi, DPR and KPK were questioned.

Corresponding Author:

Asrofin Nur Kholifah,

English Department, Faculty of Humanities,
Universitas Jenderal Soedirman

Jl. Dr. Soeparno Karangwangkal Purwokerto, Indonesia.

Email: asrofin.kholifah@unsoed.ac.id

PENDAHULUAN

Keberadaan KPK bagi sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan harapan akan penegakan keadilan sekaligus indikator supremasi hukum bekerja. Di tengah maraknya kasus korupsi yang terjadi dan terungkap beberapa tahun terakhir menandakan pentingnya keberadaan KPK sebagai komisi independen yang bertugas memberantas dan menumpas segala bentuk rasuah. Namun, independensi KPK akhir-akhir ini mulai dipertanyakan terutama setelah dilantik lima Dewan Pengawas KPK yang ditunjuk langsung oleh presiden Joko Widodo. Dewan Pengawas tersebut dilantik presiden Jokowi di Istana Negara pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019. Kelima tokoh tersebut adalah Artidjo Alkostar (mantan hakim agung), Albertina Ho (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang), Syamsuddin Haris (peneliti), Harjono (mantan hakim Mahkamah Konstitusi), dan Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan komisioner KPK).

Berbagai reaksi mewarnai penunjukan dewan tersebut antara lain pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar (liputan6.com tanggal 12 Desember 2019, 15.30 wib) yang mewanti-wanti masyarakat untuk selalu memantau agenda pemberantasan korupsi yang diduga dilemahkan lantaran direvisinya UU KPK. Menurutnya, pemilihan Dewan pengawas yang dinarasikan sebagai orang baik dan

berintegritas itu sengaja diciptakan untuk menyamarkan agenda terselubung agar masyarakat mau menerima perubahan UU itu. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh peneliti ICW Kurnia Ramadhana yang secara terang-terangan menyatakan pesimismenya tentang dewan pengawas terpilih itu (nasional.kompas.com tanggal 20 Desember 2019, 14.04 wib). Ia pesimis dengan mempertanyakan proses pemilihan dan integritas panitia seleksi. Bahkan, sikap keberatan pembentukan dewan pengawas dilontarkan oleh wakil ketua KPK tahun 2015-2019, Laode M Syarief (cnnindonesia.com tanggal 20 Desember 2019, 17.56 wib). Ia lebih memperhatikan tugas dan wewenang dewan pengawas yang tidak hanya mengawasi tetapi juga memberi ijin atau menyetujui. Ini berdampak pada ruang gerak KPK yang menjadi terbatas.

Sementara itu berbagai media gencar memberitakan sesuai dengan persepsi yang seringnya dipengaruhi oleh subjektifitas jurnalis termasuk ideologi redaksi media tersebut. Tak terkecuali media online *Tempo* yang memberitakan isu ini pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 15.08 wib dengan judul "Selamat Datang, KPK Jokowi". *Tempo* dipilih sebagai sumber data penelitian ini karena posisinya sebagai salah satu media berita terkemuka di Indonesia yang menyajikan wacana teks berita secara aktual. Melalui kolomnya, berita ini disajikan dengan sarat muatan sentimen jurnalisnya. Sikap jurnalis dalam menyajikan berita terlihat dari pilihan kata dan konstruksi gramatikalnya yang membangun realitas sosial dari pemberitaan yang diwacanakannya. Untuk dapat menjelaskan bukti linguistiknya secara detil, piranti appraisal digunakan pada penelitian ini.

Penelitian tentang appraisal sejauh ini sudah banyak dilakukan. Nur&Hadi (2016) mengidentifikasi dan memaparkan bentuk appraisal yang mencakup *attitude*, *engagement* dan *graduation* yang ditemukan di iklan lipstik di salah satu akun instagram. Komentar-komentar yang digunakan pengguna Instagram tersebut cenderung menggunakan bentuk *affect* sebagai *attitude* dalam iklan tersebut. Kemudian penelitian Sukma (2018) membidik slogan kampanye politik sebagai sumber wacana untuk mengungkap sistem appraisal yang ada dan sumber penilaian. Penelitiannya menyimpulkan bahwa *judgment* merupakan realisasi *attitude* yang dominan digunakan dan sumber penilaian paling banyak berasal dari bakal calon kepala daerah sebagai pembuat iklan. Sebagian besar penelitian lainnya juga menjelaskan sistem appraisal dan bentuk *attitude* yang digunakan (Hidayani, 2006; Endah, 2008; Adi, 2013; Suherman, 2008; Sutrisno, 2013 dan Chalimah dkk, 2018) dengan mengambil teks karya sastra atau teks fiksi dan berita. Selain itu penelitian appraisal serupa juga dilakukan oleh Irlinda, Santosa dan Kristina (2016) yang hanya memusatkan analisisnya pada solidaritas dan keberpihakan jurnalis dalam suatu teks konferensi pers. Sementara itu, Hong (2012) mengambil teks sesi tanya jawab dalam pidato wakil Presiden AS, Cheney di Universitas Fudan dan terjemahannya untuk melihat pemosisian penerjemah dan dampaknya terhadap teks sasaran. Selanjutnya, Zhang&Liu (2015) membandingkan teks berita New York Times dan China Daily (versi Bahasa Inggris) dengan memusatkan kajiannya pada *engagement* untuk melihat ideologi jurnalis. Dari penelitian-penelitian terkait itulah, penelitian ini bermaksud mengungkapkan sikap jurnalis yang mencakup sikap, sumber sikap dan bagaimana itu direalisasikan dalam menyajikan berita tentang penunjukan Dewan Pengawas KPK. Melalui pilihan kata dan konstruksi gramatikalnya, sikap penulis akan teridentifikasi apakah ia cenderung menilai

positif atau negatif keputusan presiden Jokowi dalam merealisasi program kerjanya memberantas korupsi.

TEORI DAN METODOLOGI

Dalam mengidentifikasi dan menjelaskan sikap jurnalis, teori Appraisal diterapkan. Teori Appraisal merupakan pengembangan metafungsi bahasa dari *Systemic Functional Grammar* yang digagas Halliday. Metafungsi bahasa menjelaskan bahwa bahasa merealisasikan tiga makna sekaligus yaitu makna ideasional, interpersonal dan tekstual. Perhatian utama teori appraisal ini ada pada ranah makna interpersonal. Martin & White (2005: 33) menyatakan bahwa pada tingkatan *discourse semantics*, appraisal ditempatkan pada makna interpersonal dan berartikulasi bersama dengan dua sistem lainnya yaitu negosiasi dan keterlibatan. Bagaimana makna dinegoisasikan dan bagaimana keterlibatan antar partisipan dalam suatu peristiwa wacana menjadi fokus pendekatan ini. Dalam teorinya, Appraisal terbagi menjadi beberapa subsistem yaitu *attitude (affect, judgment, appreciation)*, *engagement (monogloss dan heterogloss)* dan *graduation (force dan focus)*. Teori ini berusaha menyingkap emosi atau perasaan penulis atau penutur, bagaimana ia memberi penilaian terhadap orang lain dan benda, membangun hubungan dengan pihak lain dan pemosisian dirinya dalam interaksi. Dengan demikian, teori ini sangat tepat digunakan untuk mengungkap sikap jurnalis dalam menyajikan berita yang dapat menunjukkan sentimennya terhadap isu berita yang ditulisnya.

Penelitian ini menggunakan ancangan kualitatif bersifat deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian. Pada umumnya, penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena jenis penelitian bertujuan untuk memahami dan memaparkan fenomena budaya yang tersembunyi atau sedikit diketahui (Santosa, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sikap jurnalis dalam menyajikan berita tentang pemilihan dewan pengawas KPK melalui piranti appraisal. Data penelitian ini diambil dari portal berita online *Tempo* melalui laman <https://kolom.tempo.co/read/1287822/selamat-datang-kpk-jokowi/full&view=ok> yang dimuat pada tanggal 26 Desember 2019 dan dilakukan secara purposif. Data utama penelitian ini adalah teks berita yang berjudul "Selamat datang, KPK Jokowi" yang menyoroti dipilihnya lima tokoh sebagai depan pengawas KPK yang dinilai tidak efektif dalam membawa perubahan positif bagi KPK. Dalam penelitian linguistik, data utamanya adalah fenomena linguistik yang muncul dalam peristiwa kebahasaan. Dalam hal ini, fenomena yang muncul adalah sikap jurnalis dalam menyikapi peristiwa pemilihan dewan pengawas KPK yang direalisasikan melalui pilihan kata dan gaya pemberitaannya, serta ideologi yang terefleksikan baik personal maupun institusional dalam hal ini koran *Tempo*.

Sementara itu, teknik analisis data menggunakan analisis isi yang dikemukakan oleh Spradley (1980) yang terdiri dari analisis domain, taksonomi, komponensial dan tema budaya. Melalui model analisis ini, teks diidentifikasi apakah termasuk data atau bukan pada level analisis domain. Yang disebut data dalam penelitian ini meliputi unit lingual pada level kata, frase, klausa yang mengandung sikap atau penilaian jurnalis terhadap isu yang diangkat. Kemudian analisis taksonomi dilakukan dengan membuat klasifikasi berdasarkan sistem dan sub sistem Appraisal yaitu *attitude* yang meliputi *affect, judgment* dan *appreciation*, sumber sikap apakah *monogloss* atau *heterogloss* dan *graduation* apakah termasuk *force* atau *focus*. Dari kategorisasi tersebut kemudian dikaitkan satu sama lain untuk membangun makna. Konteks situasi, sosial dan budaya berkontribusi dalam mengkonstruksi makna yang terbentuk melalui piranti appraisal yang ditemukan. Akhirnya dari analisis komponen tersebut akan dapat ditemukan tema budaya yang merefleksikan realitas sosial yang lebih luas, dalam hal ini, sentimen jurnalis terhadap isu yang diberitakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, piranti appraisal yang ditemukan dalam teks berita *Tempo* tentang penunjukan dewan pengawas KPK akan dipaparkan. Beberapa tabel disajikan untuk memberikan ilustrasi yang lebih jelas dan diikuti dengan narasi yang memaparkan temuan penelitian. Dari hasil analisis yang dilakukan, piranti appraisal yang dominan ditemukan adalah *judgment* dan *appreciation*. Untuk lebih jelasnya, distribusi piranti appraisal dalam teks ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. piranti appraisal pada teks berita Tempo tentang penunjukan dewan pengawas KPK

attitude		Source of attitude				Amplification							
affect		judgment		appreciation		mono	hetero	force		focus			
+	-	+	-	+	-			Int.	Att.lex	met	swr	sharp	soft
3		4	16	0	10	13	11	14	7	5	0	1	3

Catatan:

+: positif; -: negatif; mono: monogloss; hetero: heterogloss; Int.: intensifier; att.lex: attitudinal lexis; met: metaphors; swr: swearing; sharp: sharpen; soft: soften

Temuan appraisal pada teks ini menunjukkan bahwa sikap direalisasikan dalam bentuk *affect*, *judgment* dan *appreciation*. Judgment negatif merupakan bentuk sikap yang paling banyak muncul sedangkan judgment positif hanya ditemukan 4 data. Sementara itu *affect* hanya ditemukan 3 data dan bersifat negatif sedangkan *appreciation* diidentifikasi 10 data yang kesemuanya negatif. Selanjutnya, dilihat dari sumber penilaiannya, teks ini menggunakan *monogloss* yang berasal dari penilaian jurnalis sendiri sejumlah 13 data dan 11 data *heterogloss* mengacu pada penilaian di luar jurnalis. Dari aspek *amplification* atau *graduation*, sebagian besar berwujud intensifier yang diidentifikasi 14 data kemudian diikuti *attitudinal lexis* sebanyak 7 data dan metafora yang ditemukan pada 5 data. Selain itu untuk fokus ditemukan 3 data yang berfungsi memperhalus pesan dan 1 data yang digunakan untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan.

1. Sikap

Affect

Affect yang ditemukan dalam teks berita Tempo tentang penunjukan Deawan Pengawas KPK disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. Affect dalam Teks Berita Tempo

APPRAISING ITEMS		APPRAISED ITEMS
Positive	Negative	
	(21b) meloloskan begitu saja: sat/pleasure	Presiden
	(29) Berkali kali mengeluh: dissat/displeasure	Presiden
	(10) Mengancam: insecurity/disquiet	Independensi KPK

Dalam sub sistem Attitude, affect berkaitan dengan perasaan positif dan negatif apakah seseorang itu senang, sedih, percaya diri, cemas, tertarik atau bosan (Martin&White, 2005: 42). Dalam wacana teks berita ini affect yang ditemukan semuanya bersifat negatif. Data

(21b) mengacu pada sikap presiden terhadap usul panitia seleksi komisioner KPK. Di sini disampaikan bahwa Jokowi meloloskan begitu saja usul dari panitia seleksi untuk disampaikan ke DPR. Ini menunjukkan bahwa Jokowi setuju dan puas dengan pilihan panitia seleksi. Kemudian pada data (29) Presiden menyatakan ketidakpuasannya terkait dengan kinerja beberapa kepala daerah yang tidak berani mengambil sikap tegas melalui kebijakan karena takut terjerat hukum. Ia menginginkan sikap tegas dari kepala daerah untuk lebih berani mengambil kebijakan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Namun kenyataannya, beberapa kepala daerah bersikap terlampau hati-hati hingga terkesan tidak tegas dalam mengambil suatu kebijakan. Sementara itu data 10 menunjukkan sikap ketidakamanan independensi KPK seiring diberlakukannya UU revisi. Pilihan lexis *mengancam* digunakan untuk menunjukkan keadaan KPK yang mulai terusik independensinya karena riskan mendapatkan intervensi dari dewan pengawas. Ini akan sangat berdampak terhadap kinerjanya yang selama ini dipercaya rakyat untuk mampus segala bentuk korupsi.

Judgment

Tabel 3. Judgment dalam Teks Berita Tempo

APPRAISING ITEMS		APPRAISED ITEMS
Positive	Negative	
(3) Rekam jejak bagus	(4) Tapi ibarat rumah, KPK telah dirusak pada fondasi dan tiang-tiang utamanya. (5) Menambahkan karpet dan sofa bagus boleh jadi akan membuat rumah terlihat cantik, tapi tak menjadikannya kukuh. (7a) oligarki (8) Terkesan sembunyi-sembunyi (ver) (15a) Berlaku lajak dan tanpa kontrol (prop.) (17a) "orang baik" (18) Tidak memiliki hak eksekusi (19b) Cacat rekam jejak (20) Paling disorot; Diduga bertemu dengan orang beperkara (ten.) (21) Dengan berlagak pilon (cap.) (22) Menutup mata dan telinga (prop.)	Lima tokoh publik + KPK - KPK - DPR - DPR - KPK - Dewan Pengawas - "orang-orang baik" - Komisioner KPK - Firli Bahuri - Jokowi - DPR -
(23) dapat menyelamatkan KPK		Jokowi +
(24) Ia juga memiliki wewenang mengeluarkan Perpu		Jokowi +
	(25) Tapi janji tinggal janji (ver.)	Jokowi -

	(26) Menutup kuping (prop.)	Jokowi -
	(30) Tampaknya lupa (cap.)	Jokowi -
	(34b) dilemahkan (cap.)	KPK - KPK+
(36) Dapat menjadi partner pemerintah		
	(37) Kecuali untuk melindungi oligarki dan kekuasaannya, Sulit diterima akal sehat Jokowi tak memahami prinsip-prinsip itu (ver.)	Jokowi -
$\Sigma = 4$	$\Sigma = 16$	Jkw: 5-/2+; KPK: 5-/1+; DPR: 3-; Dewas: 2-/1+; FB: 1-

Temuan yang paling menarik dari penelitian ini adalah dominasi judgement yang digunakan oleh jurnalis untuk membentuk opini publik terkait isu penunjukan dewan pengawas KPK. Pihak yang paling banyak mendapatkan penilaian adalah presiden Jokowi dan KPK yang menjadi target berita ini. Jokowi diberi penilaian negatif terkait keputusan dan langkah yang diambil, misalnya data (21) menunjukkan kapasitas Jokowi sebagai kepala negara yang dipertanyakan, *dengan berlagak pilon*, seolah-olah Jokowi pura-pura tidak mengetahui motif panitia seleksi dibalik dipilihnya lima tokoh yang akan mengawasi kerja KPK. Di samping itu dengan pemilihan ungkapan *tampaknya lupa* (data 30) seakan ingin menunjukkan ketidakmampuan seorang presiden dalam menguasai dan memahami aturan hukum termasuk UU KPK dalam menindak pejabat pemerintah. Sikap Jokowi yang tidak mempertimbangkan pendapat pihak lain juga ditunjukkan oleh jurnalis melalui data (26) *menutup kuping*. Begitu pula data (25) menyiratkan ketidakkonsistennya Jokowi dalam membuat janji dan memberikan bukti selama kepemimpinannya. Secara umum, penilaian Jokowi dititikberatkan pada kapasitasnya yang dipertanyakan dan kesungguhannya dalam membawa Indonesia bebas korupsi. Bahkan jurnalis mengkritik Jokowi yang bersikap tidak jujur dan loyal termasuk terhadap janjinya sesuai dengan kewenangannya untuk mengeluarkan perpu. Penilaian positif digunakan untuk menunjukkan kewenangan Jokowi dan kemampuannya untuk menyelamatkan KPK dengan mengeluarkan Perpu. Namun penilaian ini dibantah dengan argumen selanjutnya yang mengatakan bahwa Jokowi memuluskan pilihan panitia seleksi dengan memilih lima tokoh sebagai dewan pengawas setelah sebelumnya menyetujui revisi UU KPK yang bagi sebagian pihak merupakan upaya pelemahan KPK.

Kemudian, pihak kedua yang dinilai adalah KPK. Pembuat berita memberikan nilai negatif terhadap KPK. KPK dianalogikan sebagai rumah yang fondasi dan tiang-tiang utamanya dirusak. Menempatkan kelima tokoh yang memiliki rekam jejak baik seperti menambahkan sofa dan karpet bagus sebagai pemanis rumah. Hanya saja itu tidak membuat rumah menjadi kuat. Dengan kata lain, dewan pengawas dianggap sebagai pelengkap dan pemanis untuk menampilkan citra KPK lebih *reliable* dan *credibel* tanpa menyadari bahwa kekuatan KPK sudah digero-goti oleh kepentingan sebagian golongan. Apalagi ini menyangkut wewenang dewan KPK yang menimbulkan keberatan bagi sebagian kalangan termasuk wakil ketua KPK 2015-2019, La Ode Syarief. Seperti diketahui wewenang dewan pengawas salah satunya memberi ijin penyadapan dan penggeledahan yang selama ini tidak ada aturan demikian. Ini disinyalir menghambat ruang gerak KPK dan mengurangi independensi KPK. Penulis berita menganggap

tudingan kepada KPK yang bersikap berlebihan dan tanpa kontrol hanyalah bersifat manipulatif dan mengada-ada. Sebaliknya KPK dapat menjadi partner pemerintah dalam memerangi korupsi namun dengan adanya dewan pengawas sekarang menjadikan kerja KPK menjadi lebih berat dan berada di bawah kendali dewan Pengawas bentukan presiden Jokowi.

Selain Jokowi dan KPK, DPR mendapatkan penilaian negatif karena dianggap berkolaborasi dengan presiden dalam meloloskan pembentukan dewan pengawas. DPR dipertanyakan kejujuran dan integritasnya seperti yang terlihat pada data (8) *terkesan sembunyi-sembunyi* dan (22) *menutup mata dan telinga*. Di sini, penulis berita mengkritik perilaku DPR yang tidak transparan dalam menyusun pasal UU revisi KPK. Secara diam-diam DPR sengaja memasukkan sejumlah pasal yang diduga mengganggu netralitas KPK dalam memerangi kasus korupsi. Bahkan DPR terkesan tidak peduli dengan saran publik termasuk demonstrasi oleh mahasiswa yang menolak revisi UU bahkan KPK sendiri. Untuk itulah penulis berita menjulukinya dengan oligarki DPR karena menurut penilaiannya, DPR hanya mewakili sebagian kecil kelompok yang berkuasa dan untuk memertahankan kekuasaannya. Oligarki dimaknai sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu (KBBI online). Dalam konteks ini, istilah oligarki mengacu pada DPR yang alih-alih mewakili suara rakyat hanya menyuarkan kepentingan kelompok-kelompok yang berkuasa.

Selanjutnya ketua KPK terpilih Firli Bahuri juga nilai negatif karena terpilihnya Firli Bahuri menjadi sorotan. Hal ini tak lepas dari kenyataan bahwa komisaris jenderal polisi ini ketika menjabat sebagai deputi bidang penindakan diduga bertemu dengan orang-orang yang beperkara hukum. Hal ini melanggar etika pekerjaan yang diembannya dan netralitasnya menjadi dipertanyakan. Terakhir, dewan pengawas dinilai positif menyangkut rekam jejak mereka yang terbukti baik dibidangnya. Misalnya Artidjo Alkotsar yang terkenal tegas dalam memutus setiap perkara. Beberapa kali bahkan beliau memperberat hukuman koruptor yang mengajukan kasasi ke MA contohnya Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh. Namun penyematan "orang/orang-orang baik" menandakan bahwa penulis berita tidak sepenuhnya mempercayai kapasitas kelima dewan pengawas tersebut. Ia membantah argumen yang menyebutkan penempatan 'orang baik' tersebut di KPK sebagai ikhtiar terakhir untuk memperkuat komisi terdengar naif karena mereka tidak memiliki hak eksekusi.

Appreciation

Tabel 4. Appreciation dalam Teks Berita Tempo

APPRAISING ITEMS		APPRAISED ITEMS
Positive	Negative	
	(1) Sama sekali tidak perlu dirayakan	Penunjukan Dewan pengawas KPK
	(6) klimaks dari sekuel pelemahan KPK	Penunjukan Dewan Pengawas KPK
	(7b) kilat	Revisi UU
	(10) Birokratis, kaku, tidak adaptif, apalagi inovatif	Aturan baru (UU revisi)
	(11) Menghambat ruang gerak	birokrasi
	(15b) manipulatif dan mengada-ada	tuduhan

	(17b) sungguh terdengar naif	argumen
	(33) program raksasa; rawan diselewengkan	Program pemerintah
	(34a) menggila	korupsi
	(34) melorot	Indeks kemudahan berusaha
$\Sigma=0$	$\Sigma=10$	Penunjukan DPKPK: 2-; UU revisi: 2-; birokrasi: 1-; tuduhan: 1-; argumen: 1-; ProPem: 1-; korupsi: 1-; indeks: 1-

Appreciation digunakan penulis berita untuk menilai keadaan, sesuatu atau peristiwa tertentu. Berdasarkan tabel di atas, appreciation muncul dalam bentuk penilaian negatif terhadap penunjukan Dewan Pengawas KPK (2), UU revisi (2), birokrasi, tuduhan, argumen, program pemerintah, korupsi dan indeks kemudahan berusaha. Penulis berita memberikan apresiasi negatif terhadap dewan pengawas melalui frasa **tidak perlu dirayakan sama sekali** dan menganggap itu sebagai klimaks dari sekuel pelemahan KPK. Ini menunjukkan reaksi yang negatif dari penulis berita karena memandang bahwa langkah yang diambil presiden tersebut tidak akan membawa keadaan KPK menjadi lebih baik. Bahkan kata **klimaks** dan **sekuel** sengaja disematkan untuk menunjukkan kepada publik bahwa pelemahan KPK sudah dan sedang terjadi yang puncak dari pelemahan KPK adalah dengan dipilihnya dewan pengawas KPK itu sendiri. Penulis berita menunjukkan sentimennya dengan menggunakan keadaan KPK yang ironis. Selain itu UU revisi KPK dinilai disusun secara tergesa-gesa oleh DPR untuk mengamankan kepentingan-kepentingan kelompok yang mungkin terlibat. Kata *kilat* menandakan proses yang terlalu cepat dan terkesan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini terkait dengan sikap DPR yang terkesan diam-diam dalam merumuskan dan memasukkan pasal yang diduga bisa melemahkan kewenangan KPK. Akibatnya, UU revisi melalui aturan barunya menjadi birokratis, kaku, tidak adaptif dan inovatif terutama dengan status penyidik yang menjadi aparat sipil negara atau pegawai negeri. Ini terkait juga dengan birokrasi yang menghambat ruang gerak KPK dalam menuntaskan perkara korupsi. Sebagai contoh, selain diawasi oleh DPR, penyadapan oleh KPK harus melalui audit Kementerian Komunikasi dan Informatika. Birokrasi seperti ini dianggap semakin menghambat ruang gerak KPK.

Selain itu, pilihan lexis *manipulatif dan mengada-ada* dan *sungguh terdengar naif* terkait dengan tuduhan dan argumen pihak yang mendukung pembentukan dewan pengawas menunjukkan kuatnya sentimen negatif yang ingin disampaikan oleh penulis berita. Argumen itu dipandang tidak memiliki bukti dan alasan yang kuat. Menganggap penempatan Dewan Pengawas sebagai ikhtiar terakhir untuk memperkuat KPK dimentahkan karena tidak ada jaminan dewan pengawas memiliki kekuasaan atas KPK mengingat dewan tersebut tidak memiliki hak eksekusi. Hak eksekusi tetap menjadi wewenang KPK padahal pimpinan KPK terpilih pun diragukan kapasitas dan kenetralannya. Lebih lanjut, penulis berita juga memberikan apresiasi yang negatif terhadap program pemerintah yang meliputi pemindahan ibukota, penyaluran dana desa dan pembangunan infrastruktur rawan untuk disalahgunakan. Dari sisi anggaran, proyek besar tersebut menurut penulis rentan dikorupsi. Ini juga berdampak pada kemudahan

berusaha bagi rakyat terutama kecil dan menengah akan semakin berat karena program pemerintah berbiaya tinggi dikuasai oleh kelompok yang memiliki kuasa.

2. Sumber penilaian

Sumber penilaian yang ditemukan dalam teks ini berasal dari penulis berita sendiri (monogloss) dan dari sumber lain (heterogloss) yang secara detil disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. Sumber penilaian yang Teridentifikasi dalam Teks Berita Tempo

Monogloss	Heterogloss		
	projection	concession	modality
13	1. Tudingan bahwa KPK selama ini berlaku lajak dan tanpa kontrol - sehingga membutuhkan pengawas-merupakan tuduhan yang manipulatif dan mengada-ada.	Selama ini mereka memang dikenal sebagai tokoh yang punya rekam jejak bagus	Jenjang birokrasi hampir dipastikan akan menghambat ruang gerak mereka dalam mengungkap kasus korupsi yang biasanya dilakukan pejabat level tinggi
	2. Argumen yang menyebutkan penempatan " orang baik " di Dewan Pengawas merupakan ikhtiar terakhir untuk memperkuat Komisi sungguh terdengar naif.	Jokowi menutup kuping meski ribuan pelajar dan mahasiswa berdemonstrasi mendesak Presiden mengeluarkan Perpu	Dalam berbagai kesempatan, Presiden mengatakan KPK hendaknya pada pencegahan ketimbang penindakan korupsi.
	3. Harap dicatat, sebagai pengawas, " orang-orang baik " itu tidak memiliki hak eksekusi.	Pelemahan KPK justru akan membuat sejumlah proyek besar pemerintah berjalan tanpa pengawasan	Dalam demo itu, setidaknya lima orang tewas akibat kekerasan aparat Ekonomi biaya tinggi- terutama disebabkan oleh korupsi- diprediksi akan menggila setelah KPK dilemahkan Indeks kemudahan berusaha diduga juga akan melorot
$\Sigma= 13$	$\Sigma= 3$	$\Sigma= 3$	$\Sigma= 5$

Dalam penyajian beritanya, jurnalis cenderung menggunakan penilaian sendiri. Sumber penilaian monogloss dieksploitasi oleh penulis berita untuk menyatakan pendirian atau sentimennya terhadap isu penunjukan dewan pengawas KPK. Di sini

penggunaan sumber monogloss dimanfaatkan oleh penulis berita karena ia memiliki keyakinan yang tinggi atas apa yang disampaikan. Penggunaan sumber monoglossik menjadikan penilaian terkesan subjektif karena tidak membuka ruang dialog atas isu tersebut. Ini berbeda dengan sumber penilaian heterogloss yang berasal dari luar penilai dan melibatkan lebih dari satu sumber. Dalam realisasinya, heterogloss berwujud *projection*, *concession* dan *modality*.

Dalam *projection*, jurnalis menggunakan sumber lain yaitu pihak yang memiliki pendapat yang berbeda dengannya. Contohnya pihak yang menilai dewan pengawas sebagai orang-orang baik yang dapat mengubah KPK menjadi lebih baik. Pihak yang menganggap penunjukan tersebut sebagai ikhtiar terakhir seolah-olah tidak ada pilihan atau cara lain dalam menyelamatkan KPK. Ini menandakan bahwa seolah-olah KPK dalam kondisi yang buruk. Jurnalis menggunakan sumber penilaian dari pihak lain untuk dikontraskan dan dipatahkan bahwa pendapat tersebut sama sekali tidak benar. Satu argumen penulis yang memiliki penilaian positif ditemukan pada jenis *concession* yaitu argumen yang menyatakan bahwa jurnalis mengakui bahwa dewan pengawas memiliki rekam jejak yang bagus namun kemudian argumen ini dipatahkan karena kewenangan mereka terbatas dan tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi kasus korupsi. Pemilihan orang-orang yang dikatakan baik ini pun tidak membawa dampak yang signifikan terhadap keadaan KPK. Hal ini juga direalisasikan pada dua data lainnya saat penulis menggunakan pilihan lexis **meski** dan **justru** yang digunakan untuk mengkonter sikap Jokowi selaku presiden yang tidak peduli dengan suara rakyat yang diwakili mahasiswa dan semakin besarnya peluang tindak korupsi terjadi.

Selain dua jenis sumber di atas, penulis banyak mengeksplorasi modalitas untuk menyampaikan sentimennya. Bentuk modalitas ini digunakan penulis berita untuk menegosiasikan informasi yang dibangun apakah ia sangat yakin, cukup yakin atau kurang yakin dengan argumennya. Frase **hampir dipastikan akan** memiliki tingkat probabilitas tinggi. Artinya penulis percaya bahwa birokrasi yang berjenjang akan mempersempit ruang gerak dan memperlambat kinerja KPK. Selanjutnya frase **diprediksi** dan **diduga** menunjukkan tingkat probabilitas sedang. Di sini penulis melihat ada kemungkinan bahwa korupsi akan meningkat dan indeks berusaha menurun meskipun tidak bisa dipastikan. Sementara itu, lexis **setidaknya** menyatakan bahwa jumlah mahasiswa yang meninggal akibat demo bisa saja lebih dari lima tetapi paling sedikit jumlah tersebut.

3. Graduasi

Graduasi merujuk pada derajat evaluasi. Graduasi digunakan penulis berita untuk memberikan ketepatan penilaian (focus) maupun derajat besarnya penilaian (force).

Tabel 6. Graduasi yang teridentifikasi pada teks berita Tempo.

Graduation					
Force			Focus		
intensifier	Attitudinal lexis	Metaphors	Swearing	Sharpen	Soften
sama sekali tidak perlu	KPK Jokowi	Ibarat rumah, KPK telah dirusak pada fondasi dan		memang	Boleh jadi

		tiang-tiang utamanya			
Paling disorot	klimaks	Menambahkan karpet dan sofa bagus			biasanya
Puluhan bupati	Oligarki DPR	Menutup mata dan telinga			tampaknya
Ribuan pelajar	kilat	Janji tinggal janji			
setidaknya	menjerat	Menutup kuping			
dapat	tewas				
Dalam berbagai kesempatan	menggila				
Berkali-kali					
Sejumlah proyek besar					
Sejumlah pasal					
Program raksasa					
akan					
Harap dicatat					
justru					
$\Sigma= 14$	$\Sigma= 7$	$\Sigma= 5$	$\Sigma= 0$	$\Sigma= 1$	$\Sigma= 3$
		$\Sigma= 23$			$\Sigma= 7$

Bentuk gradulasi yang paling banyak ditemukan adalah derajat penilaian (force) dalam wujud *intensifier* sejumlah 14, lexis attitudinal sebanyak 7, metafora sejumlah 5 dan tidak ditemukan bentuk *swearing* pada tipe ini. Sementara itu derajat ketepatan penilaian direalisasikan oleh *sharpening* 1 temuan dan *softening* 3 temuan. Banyaknya temuan intensifier menandakan bahwa penulis berita memberikan penilaian untuk menggiring opini publik agar memnyetujui argumennya. Frase **sama sekali tidak perlu** di sini menyatakan tingkat sentimen negatif yang tinggi dalam menyikapi penunjukkan dewan pengawas. Dengan kata lain, penunjukan ini bukanlah sesuatu yang membanggakan hingga layak untuk dirayakan. Kemudian, frase **paling disorot** mengisyaratkan tingginya kontroversi yang muncul sebagai reaksi dipilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK. Ia dianggap cacat rekam jejak karena diduga pernah berhubungan dengan orang-orang beperkara saat ia menjabat sebagai deputi penindakan KPK. Konstruksi gramatika yang dipilih dalam intensifier kesemuanya menguatkan argumen yang sedang dibangun untuk mengarahkan pembaca memiliki persepsi ketidaklayakan kerja DPR, dewan pengawas dan Jokowi.

Selain itu, lexis-leksis attitudinal yang dipilih penulis antara lain **klimaks**, **tewas**, **menggila** menunjukkan penilaian yang dieskalasi. Klimaks digunakan untuk menunjukkan bahwa penunjukkan dewan pengawas merupakan tindakan yang paling ekstrim untuk melemahkan KPK. Sebelumnya ia menjelaskan bahwa KPK berada dalam kondisi lemah dan penunjukkan ini justru menjadi puncak dari upaya pelemahan KPK. Bahkan pemberian nama KPK Jokowi pada judul menunjukkan dependensi KPK terhadap Presiden. Ini mengisyaratkan bahwa kerja KPK berada di bawah kontrol Jokowi. Dengan

kata lain, netralitas KPK sangat dipertanyakan. Ini serupa dengan penyematan kata oligarki pada DPR. Penulis melabeli oligarki DPR untuk memberikan penilaian bahwa bukannya mewakili rakyat sebagaimana tugas utamanya, DPR hanya menyuarakan kepentingan kelompok yang berkuasa. Lebih lanjut, penggunaan gaya bahasa dengan bentuk metafora dipakai penulis berita untuk menggambarkan keadaan KPK yang dianalogikan dengan yang telah rusak fondasi dan tiang utama dan lemahnya komitmen DPR dan Jokowi dalam memberantas korupsi. Jokowi dan DPR dinilai tidak menghiraukan suara publik dalam menyusun UU revisi KPK. Frase **menutup mata dan telinga** dan **menutup kuping** digunakan untuk memberikan penilaian ini.

Menariknya, fokus penilaian lebih banyak didominasi pada pelemahan (softening). Frase **boleh jadi** pada klausa menambahkan karpet dan sofa bagus boleh jadi akan membuat rumah terlihat cantik tapi tak menjadikannya kukuh menandakan pesimisme penulis tentang peran dewan pengawas di KPK. Meskipun mereka memiliki rekam jejak yang bagus, yang diibaratkan dengan karpet dan sofa bagus, mereka tidak akan menjadikan KPK kuat atau lebih baik. Kemudian kata **tampaknya** digunakan untuk menilai Jokowi yang seolah-olah melupakan batasan penerapan pasal korupsi pada pejabat pemerintah. Sementara itu, kata **biasanya** merujuk pada penilaian bahwa praktek korupsi seringkali dilakukan oleh pejabat level tinggi. Temuan graduasi yang ada menunjukkan bahwa penulis berita banyak mengeksplorasi lexis intensifier dan attitudinal untuk memperkuat argumen dan menggiring opini publik pada sentimen negatif terhadap pemerintah.

Secara keseluruhan, penulis berita menunjukkan sentimen negatif terhadap keputusan Jokowi terkait penunjukan dewan pengawas KPK. Dari aspek sikap, judgment negatif ditujukan kepada Jokowi, DPR, KPK termasuk ketuanya, dan dewan pengawas. Jurnalis tersebut mempertanyakan dan menyangsikan kinerja, komitmen dan integritas mereka dalam mengemban amanah. Dari aspek apresiasi, sentimen negatif pun mudah terlihat dari penilaiannya terhadap penunjukan dewan pengawas, UU revisi, birokrasi, program pemerintah yang kesemuanya tidak menjadikan KPK bekerja dengan lebih baik bahkan membuka peluang praktik korupsi lebih besar. Dengan dihambatnya ruang gerak KPK melalui birokrasi yang berjenjang dan aturan yang lebih kaku, penulis berita menilai bahwa KPK semakin dipertanyakan kinerja dan netralitasnya. Dari sumber penilaian, penulis menggunakan dua sumber monogloss dan heterogloss untuk mengkonstruksi realitas sosial yang ada. Sementara itu dari aspek graduasi, kekuatan intensifier dan lexis attitudinal mendominasi penilaian penulis berita. Dalam konteks ini, penulis tidak dapat dilepaskan dari kepentingan media yang menaunginya. Oleh karena itu wacana yang dikonstruksikan Tempo dalam pemberitaannya bukanlah peristiwa yang netral melainkan sudah dipengaruhi oleh perpektifnya terhadap realitas tersebut. Mereka secara selektif mengambil aspek-aspek yang perlu ditonjolkan dan aspek-aspek yang perlu disembunyikan atau dihilangkan. Dalam hal ini penulis mengikutsertakan cara pandangnya dalam membangun realitas penunjukan dewan Pengawas KPK. Dalam teks ini, penulis berita sebagai representasi dari media Tempo lebih menyoroti nilai-nilai negatif pemerintah. Penulis menggiring pembaca pada satu pemahaman bahwa netralitas KPK dipertanyakan begitu juga kapasitas dan integritas Jokowi dan DPR.

SIMPULAN

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa media online Tempo dalam pemberitaan mengenai penunjukan Dewan Pengawas KPK menunjukkan sentimen negatif. Ini terlihat dari temuan distribusi piranti appraisal yang didominasi oleh affect, judgment dan appreciation negatif. Dominasi judgment dan appreciation dalam temuan ini sudah sesuai dengan karakteristik wacana teks politik yang menitikberatkan pada penilaian perilaku manusia, peristiwa, hal dan benda yang terkait. Media tempo melalui jurnalisnya memosisikan sebagai pihak yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah tentang penunjukan Dewan Pengawas KPK yang dinilai tidak perlu, justru semakin melemahkan fungsi KPK. Jokowi dan DPR dinilai mengintervensi KPK sehingga netralitas KPK patut dipertanyakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. (2013). *Analisis ungkapan-ungkapan sikap tokoh utama dalam novel The Body in the Library karya Agatha Christie dan pengaruhnya terhadap kualitas terjemahan*. Tesis. Universitas Sebelas Maret.
- Chalimah, dkk. (2018). *Evaluating attitude in news text: appraisal in critical discourse study*. 4th PRASASTI International Conference on Recent Linguistics Research. Prosiding.
- Endah, P.L. (2008). *The use of attitude as a part of appraisal system in The AlJazeera News: Iraq Wars*. Tesis. Universitas Negeri Semarang.
- Hidayani, S. (2006). *Appraisals used in the dialogue of Oscar Wilde Drama "The Importance of Being Earnest"*. Tesis. Universitas Negeri Semarang.
- Hong, Q. (2012). Investigating Translators' Positioning via the Appraisal Theory: A Case Study of the Q&A Part of a Speech Delivered by the U.S. Vice President Cheney. *Sino-US English teaching*, 12/2012: 1775-1787. (ISSN: 1539-8072).
- <https://kolom.tempo.co/read/1287822/selamat-datang-kpk-jokowi/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2019
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190919184755-12-432078/laode-ingin-dewan-pengawas-cukup-mengawasi-kpk>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2019
- <https://www.liputan6.com/news/read/4139431/publik-diminta-tak-termakan-jebakan-batman-soal-dewan-pengawas-kpk?source=search>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2019
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/20/14040301/icw-pesimistis-dengan-kepemimpinan-firli-bahuri-di-kpk>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2019
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2019
- Irlinda, A.H, Santosa, R, Kristina, D. (2016). Analisis terjemahan ekspresi solidaritas dan keberpihakan dalam teks konferensi pers dan siaran media tentang eksekusi narapidana (pendekatan teori appraisal). *Prasasti: Journal of Linguistics* 1 (2), 187-209
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Martin, J.R. & White, P.R.R. (2005). *The language of evaluation: appraisal in English*. New York: Palgrave Macmillan
- Nur, A.M. & Hadi, A.S. (2016). Realisasi appraisal dalam aspek attitude pada media online instagram. *Jurnal Sasindo Unpam*, 3 (2), 15-25

- Santosa, R. (2017). *Metode penelitian kualitatif kebahasaan*. Surakarta: UNS Press.
- Spradley, J. (1980). *Participant observation*. USA: Holt, Rinehart and Winston.
- Suherman. (2008). *Sistem appraisal berita kriminal pada Harian Meteor dan Harian Suara Merdeka*. Tesis. Pascasarjana Linguistik, Universitas Diponegoro Semarang.
- Sukma, B.P. (2018). Sistem Appraisal pada slogan dalam kain rentang kampanye politik bakal calon kepala daerah Kabupaten dan Kota Bogor. *Ranah*, 7(2), 132-145
- Sutrisno, A. (2013). *Analisis ungkapan-ungkapan sikap tokoh utama dalam novel 'The Body in the Library' Karya Agatha Christie dan pengaruhnya terhadap kualitas terjemahan (kajian terjemahan dengan pendekatan teori appraisal)*. Tesis, Pascasarjana Linguistik Penerjemahan, Universitas Sebelas Maret.
- Zhang, W & Liu, W. (2015). One Coin has two sides: a comparative appraisal of New York Times and China Daily's News Coverage of Alleged Internet Hacking. *Journal of Arts and Humanities (JAH)*, 4 (4), 1-15